



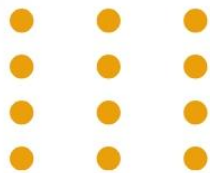
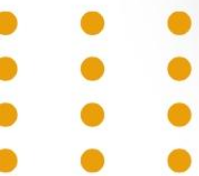
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



HUMAS BAWASLU JABAR



LAPORAN AKHIR KEHUMASAN



2025

Bawaslu

PROVINSI JAWA BARAT



jabar.bawaslu.go.id



bawaslu jabar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik serta dokumentasi komprehensif atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja kehumasan sepanjang tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan periode yang strategis bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sebagai fase pasca-penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, tahun ini menjadi momentum krusial untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, evaluasi menyeluruh, serta penguatan pengawasan partisipatif berkelanjutan. Meskipun berada pada masa non-tahapan, fungsi kehumasan tetap berjalan dinamis sebagai garda terdepan dalam merawat kepercayaan publik (*public trust*) dan menjaga kesinambungan informasi kepemiluan.

Melalui laporan ini, kami menyajikan gambaran utuh mengenai berbagai ikhtiar yang telah dilakukan Divisi Humas. Mulai dari inovasi digital melalui peluncuran sistem pengawasan partisipatif, penguatan hubungan dengan mitra strategis dan media massa, hingga raihan prestasi di tingkat nasional. Kami menyadari bahwa tantangan di era keterbukaan informasi menuntut Bawaslu untuk tidak hanya hadir sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai sumber edukasi demokrasi yang inklusif dan adaptif bagi masyarakat Jawa Barat.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua dan Anggota Bawaslu RI, jajaran Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kepala Sekretariat beserta seluruh jajaran struktural dan staf sekretariat yang telah bekerja keras mendukung program-program kehumasan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media, organisasi

masyarakat, pemantau pemilu, dan seluruh elemen masyarakat Jawa Barat yang telah bersinergi dalam "Mengawasi Bersama".

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan kinerja kehumasan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi akademis maupun sebagai bahan evaluasi untuk menyongsong agenda demokrasi selanjutnya dengan lebih baik.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Bandung, Januari 2026

Koordinator Divisi Humas dan
Data Informasi Bawaslu Provinsi
Jawa Barat,

Muamarullah

ABSTRAK

Laporan Akhir Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 menyajikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi kehumasan pada masa non-tahapan pasca-Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Tahun 2025 menjadi fase strategis bagi Bawaslu Jawa Barat dalam melakukan konsolidasi kelembagaan dan penguatan partisipasi publik guna menyongsong agenda demokrasi selanjutnya. Laporan ini menguraikan transformasi strategi komunikasi dari pengawasan tahapan menjadi edukasi demokrasi yang adaptif dan inovatif.

Sorotan utama dalam kinerja tahun ini adalah peluncuran inovasi program "Rengkong Demokrasi", sebuah forum diskusi rutin dua mingguan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas SDM Internal kehumasan salah satunya melalui pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam produksi konten edukasi pengawasan. Selain itu, Bawaslu Jawa Barat juga menghadirkan terobosan digital melalui *Sistem Pengawasan Digital Partisipatif (Siwasdatif)* untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga validitas data pemilih secara berkelanjutan. Sinergi dengan pemangku kepentingan juga diperkuat melalui forum kolaborasi dengan media massa dan organisasi masyarakat.

Secara umum, kinerja kehumasan menunjukkan capaian yang positif, ditandai dengan peningkatan interaksi publik di kanal digital dan raihan prestasi nasional, di antaranya Terbaik I Kehumasan Ramah Disabilitas dan Terbaik II Konten Grafis. Meskipun dihadapkan pada kendala teknis migrasi website dan keterbatasan dukungan anggaran, Bawaslu Jawa Barat tetap konsisten menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Laporan ini merekomendasikan pelembagaan program "Rengkong Demokrasi" serta modernisasi infrastruktur teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi pengawasan di masa depan.

Kata Kunci: *Kehumasan, Rengkong Demokrasi, Siwasdatif, Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Jawa Barat, Inovasi Digital.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN.....	2
C. LANDASAN HUKUM	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB III KEBIJAKAN KEHUMASAN	7
E. Sarana dan Prasarana.....	7
F. Sumber Daya Manusia	8
G. Monitoring dan Evaluasi.....	10
H. Peningkatan Kapasitas.....	13
I. Anggaran	15
BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN.....	17
A. PENGELOLAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL	17
J. PENGELOAAN PEMBERITAAN MELALUI WEBSITE	39
BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN	43
A. Pengelolaan Hubungan Masyarakat.....	43
B. Pengelolaan Hubungan Media	49
BAB V PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. REKOMENDASI.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pemberitaan	10
Gambar 2 Kegiatan Penguatan Kapasitas Kehumasan Diskusi Dua Mingguan	14
Gambar 3 Kegiatan Rengkong Demokrasi	15
Gambar 4 Bawaslu Jabar raih Terbaik I Kehumasan Ramah Disabilitas dan Terbaik II Konten Grafis	19
Gambar 5 Konten Video Publikatif Kegiatan Uji Petik Anggota Bawaslu Jawa Barat	22
Gambar 6 Konten Kolaborasi	23
Gambar 7 Konten Carousel Berita Terkini Kegiatan Bawaslu Jabar	23
Gambar 8 Konten Repost bawaslu RI	24
Gambar 9 Infografis	25
Gambar 10 Konten Infografis Hasil Penyelesaian Sengketa Proses	26
Gambar 11 Konten Video Edukatif Uji Petik PDPB	26
Gambar 12 Konten Edukasi Literasi Pengawasan Pemilu	26
Gambar 13 Konten Election Talk	27
Gambar 14 Konten Video Inovasi	27
Gambar 15 Konten Kuis Pintar Demokrasi	28
Gambar 16 Konten Edukasi Jurnal Keadilan Pemilu	29
Gambar 17 Profil Instagram Bawaslu Jawa Barat	34
Gambar 18 Profil Halaman Facebook Bawaslu Jabar	34
Gambar 19 Dokumentasi Audiensi KAMMI	47
Gambar 20 Audiensi Ke Kantor Partai Politik DPW PAN Jabar	47
Gambar 21 Podcast Bawaslu Jawa Barat Tema Kepastian Hukum Pemilu	48
Gambar 22 Berita Media Online terkait Bawaslu Jawa Barat	50
Gambar 23 Berita Stakeholder terkait Bawaslu Jabar Forum	51
Gambar 24 Berita Media Kompas TV tentang Bawaslu Jawa Barat	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Personil Kehumasan Bawaslu Jawa Barat	8
Tabel 2 Jumlah Postingan Perbulan 2025.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berkeadilan. Di tengah perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya partisipasi publik dalam ruang digital, fungsi kehumasan menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kelembagaan Bawaslu.

Tahun 2025 merupakan periode penting bagi konsolidasi kelembagaan pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, sekaligus sebagai fase penguatan tata kelola pengawasan yang lebih adaptif, transparan, dan partisipatif. Pada tahun ini, Bawaslu tidak hanya dituntut menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan, kegiatan, dan hasil pengawasan dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat luas.

Kehumasan Bawaslu berperan sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi publik, pengelolaan media, penguatan citra kelembagaan, serta pengembangan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui berbagai kanal komunikasi—baik media massa, media sosial, website resmi, maupun forum tatap muka—Bawaslu berupaya menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan mudah dipahami oleh publik.

Pasca Pemilu Serentak dan Pilkada Tahun 2024, Tahun 2025 memasuki masa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi yang utuh, faktual, dan berkelanjutan terkait kerja-kerja pengawasan kepegiluan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi landasan hukum bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, tidak hanya pada masa tahapan, tetapi juga pada masa non-tahapan. Pada periode ini, kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota diarahkan pada pengawasan berkelanjutan, antara lain melalui pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pengawasan data dan administrasi partai politik, serta pencegahan pelanggaran melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat atas informasi tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2025. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai badan publik berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang akurat, terbuka, dan mudah diakses terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan pada masa non-tahapan. Upaya keterbukaan informasi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan informasi publik, pemberitaan, serta publikasi aktif melalui website dan media sosial resmi Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Laporan akhir kehumasan tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dokumentasi pelaksanaan program, serta sarana evaluasi atas capaian, tantangan, dan pembelajaran yang diperoleh sepanjang tahun. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis dalam perencanaan kegiatan kehumasan Bawaslu pada periode selanjutnya.

B. TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN

Tujuan dibuatnya Laporan Akhir ini adalah sebagai laporan Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Provinsi Jawa Barat, atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi kehumasan

yang mendukung kerja-kerja pengawasan berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai upaya pertanggungjawaban atas kegiatan kehumasan yang telah dilakukan, antara lain optimalisasi fungsi dan peran kehumasan bagi jajaran internal dan pengawas adhoc, fasilitasi komunikasi dan koordinasi antar divisi melalui pemanfaatan media sosial dan media informasi lainnya, penyampaian informasi dan press release kepada media massa, serta publikasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat luas selama masa non-tahapan. Tujuan disusunnya Laporan Akhir Kehumasan ini antara lain untuk:

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Humas Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Bawaslu RI, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pada masa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga pengawas Pemilihan Umum dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan berkelanjutan, sekaligus sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan terkait;
3. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode berikutnya yang berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berintegritas.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan serta isi atas pembuatan laporan akhir ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
8. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Medsos di Lingkungan Bawaslu;
12. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Bawaslu pada Tahapan Pemilu 2024;

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan terbagi menjadi 6 (enam) BAB dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Berisikan gambaran umum gambaran umum, tujuan, landasan hukum dan sistematika laporan

2. Bab II Kebijakan Kehumasan

Berisikan penjabaran sarana dan prasarana, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas dan anggaran.

3. Bab III Pelaksanaan Fungsi Kehumasan

Berisikan narasi, tabel, diagram dan gambar dari pengelolaan publikasi melalui medsos dan *Website* pada tahun 2025

4. Bab IV Pelaksanaan Fungsi Kehumasan

Berisikan narasi, tabel, diagram dan gambar dari pengelolaan hubungan masyarakat dan hubungan dengan media tahun 2025.

5. Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan dan rekomendasi

BAB III

KEBIJAKAN KEHUMASAN

Dalam upaya meningkatkan citra dan transparansi Bawaslu Jawa Barat pada tahun 2025, lembaga ini mengarahkan fokus ke arah mengakomodir pemberitaan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, sebagai upaya menciptakan jembatan informasi yang menghasilkan citra positif di mata publik. Untuk mencapai tujuan ini, Bawaslu Jawa Barat akan menerapkan kebijakan optimalisasi kerja kehumasan yang responsif, selaras dengan perkembangan zaman, dan mematuhi arah serta kebijakan Kehumasan Bawaslu RI sebagai landasan operasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan pemberitaan dan publikasi yang dilakukan oleh lembaga ini dalam rangka pengawasan pemilu dapat mencapai tingkat optimal dan memberikan dampak positif dalam membangun kepercayaan masyarakat.

E. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kerja-kerja kehumasan, Bawaslu Jawa Barat memiliki berbagai sarana dan prasana yang biasa digunakan dalam melaksanakan tugas kehumasan. Sarana yang dimiliki oleh Bawaslu Jawa Barat berupa:

1. Hardware:
 - a. 1 buah kamera Canon 760 D
 - b. 1 buah kamera Sony a7iii
 - c. 1 buah kamera Canon M50
 - d. 1 buah perangkat komputer ASUS Vivo AIO V222FB
 - e. 1 buah perangkat komputer ASUS Vivo AIO V241FF
 - f. 1 set microphone beserta mixer untuk keperluan podcast
 - g. 1 set microphone wiriles
 - h. 1 set stand lighting untuk keperluan podcast
2. Software
 - a. Canva Premium
 - b. CapCut Premium
 - c. Filmora Pro

- d. Freepik Premium
- e. Poe AI

Sementara dari segi prasarana, Humas Bawaslu Jawa Barat memiliki ruang khusus *podcast* dan media center Bawaslu Jawa Barat.

Dari sekian sarana prasana yang ada Humas Bawaslu Jawa Barat masih memerlukan alat sebagai optimalisasi kerja kehumasan kedepan, diantaranya:

1. Kamera DSLR 2 Buah
2. Lensa Tele 1 Buah
3. Kamera Mirroles 1 Buah
4. Clip Microphone 3 Buah
5. Leptop editing Intel Core Ultra 9
6. Smartphone 1 Buah

F. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas kehumasan, Bawaslu Jawa Barat memiliki tiga orang staff humas yang dikepalai oleh 1 orang kepala bagian Hukum Humas dan Data Informasi. Pola manajemen yang diterapkan dalam melaksanakan tugas kehumasan, ialah dengan berkolaborasi dengan beberapa staff di sub bagian hukum humas dan datin serta bagian lain. Fungsi kolaborasi dilakukan guna melancarkan kerja pengelolaan kehumasan mengingat sumber daya manusia yang dimiliki bagian Humas Bawaslu Jawa Barat jauh dari porsi ideal.

Tabel 1 Personil Kehumasan Bawaslu Jawa Barat

No	Nama	Beban Kerja
1.	Isti Khoriana karim	Kepala Bagian urusan Hubungan Masyarakat sebagai Perumusan Kebijakan, Pengelolaan Reputasi dan Citra, Koordinasi Lintas Unit
2.	Andhika Pratama	membantu Kepala Bagian dalam pelaksanaan kebijakan kehumasan melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pemantauan dan analisis isu, pengelolaan reputasi dan citra lembaga,

		serta koordinasi kehumasan lintas unit kerja dan pemangku kepentingan.
3.	Irfan Pathurohman	Menyusun kalender konten kehumasan setiap bulan, Desain Grafis, Video, Penyiapan Bahan materi
4.	Huda Dindin Pratama	Fotografer dan Video, Backup Desain Grafis dan Pengelolaan Media Sosial
5.	Fadhil Nur Fitriyadi	Pengelolaan PPID, Data dan Website Penyiapan Bahan Materi Data dan Informasi
6.	Jihad Khufaya	Frame Berita Media sosial, Desain Grafis, pembuatan Rilis Berita, Sespri Kordiv Humas
7.	Tanti Meishanty W.	Pengelola PPID dan Pengelola Website
8.	Toha Mukarom	Pengelola PPID dan Pengelola Website

Manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan media Informasi Bawaslu Jawa Barat telah melakukan perencanaan yang matang dalam pengelolaan media informasi. Hal ini terlihat dari adanya penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, serta pengelola SDM yang kompeten. Bawaslu Jawa Barat juga telah membuat group media di *whatsapp* yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh media informasi.

Selain manajemen sumber daya manusia, terdapat pola pengelolaan media sosial yang diterapkan berupa SOP. Terdapat lima langkah dalam pengelolaan media sosial di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Kegiatan:** Melibatkan Relawan Media (*fullteam*) masuk hosting (siapkan powerpoint presentasi pimpinan untuk catatan jurnalistik). Maksimal waktu yang diberikan adalah 3 jam.
2. **Inventarisir Bahan Pemberitaan:** Seperti di masa-masa kampanye segera mengirim materiulisasi laporan kegiatan yang telah foto dan menyertakan

narsum kepada Kepala Bagian dan pimpinan untuk ACC. Maksimal waktu yang diberikan adalah 1 jam.

3. **Pengolahan Bahan Pemberitaan:** Tim Humas menyunting tulisan yang telah ACC dalam waktu 1,5 jam.
4. **Otentifikasi:** Koordinator Humas mengidentifikasi dan memvalidasi bahan pemberitaan di situs web atau media sosial dalam waktu 25 menit.
5. **Upload:** Tim Humas mengunggah kegiatan ke media sosial atau situs web dalam waktu lima menit.

Gambar 1 Alur Pemberitaan



Pola pengelolaan media sosial yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan media sosial yang baik. Pola tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan media sosial Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

G. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengukur serta menganalisis kinerja kehumasan Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Barat. Berikut adalah uraian mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut:

1. Perencanaan Evaluasi Kinerja Kehumasan
 - a. Penetapan Periode Evaluasi

Evaluasi kinerja kehumasan dilakukan setiap 4 bulan sekali. Penetapan periode ini dirancang untuk memberikan jangka waktu yang cukup bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi dan aktivitas komunikasi peserta, sementara juga memberikan cukup frekuensi untuk memantau perubahan dan mengatasi permasalahan dengan cepat.

b. Tujuan Penetapan Periode

Periode 4 bulan memberikan gambaran yang cukup luas dan mendalam mengenai kinerja kehumasan. Ini memungkinkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi keberhasilan jangka panjang dan melihat tren jangka menengah. Sementara itu, frekuensi evaluasi yang relatif tinggi memungkinkan respons yang cepat terhadap perubahan situasional atau kebutuhan mendesak.

c. Adopsi Prinsip Pembelajaran Berkelanjutan

Penetapan periode evaluasi setiap 4 bulan juga mencerminkan pendekatan pembelajaran berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan Bawaslu Kabupaten/Kota kehumasan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, mencoba berbagai strategi, dan memperbaiki kinerja berdasarkan pengalaman sebelumnya.

2. Aspek yang Dievaluasi

Sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja kehumasan di lingkungan Bawaslu. Kehumasan memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik, menyampaikan informasi pemilihan secara akurat, serta memperkuat citra kelembagaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang transparan dan akuntabel.

Penilaian ini mencakup periode Januari hingga September 2025 dan diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hasil assessment diharapkan menjadi dasar penguatan kapasitas, perbaikan strategi komunikasi publik, serta pengembangan praktik kehumasan yang adaptif dan inklusif.

Evaluasi tersebut mencakup 11 Kategori penilaian, yaitu Penulisan Rilis Terbaik, Program Kehumasan Terbaik, Kehumasan Ramah Disabilitas Terbaik, Pengelolaan Hubungan Media Massa Terbaik, Produktivitas Berita, Penulisan Berita, Foto Humanis, Video Edukasi, Konten Grafis, Media Sosial, dan Konten Terpopuler. Keseluruhan kategori tersebut dirancang untuk merepresentasikan kinerja kehumasan secara komprehensif, baik dari aspek produksi konten, pengelolaan relasi media, hingga dampak komunikasi kepada publik.

Berdasarkan hasil penilaian, terlihat adanya capaian kinerja yang beragam antar Bawaslu Kabupaten/Kota. Beberapa daerah menunjukkan performa yang konsisten dan menonjol di berbagai kategori, seperti Kabupaten Bandung Barat, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi. Capaian ini mencerminkan pengelolaan kehumasan yang terstruktur, produktif, serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan komunikasi publik.

Di sisi lain, terdapat pula daerah yang menunjukkan keunggulan pada kategori tertentu, seperti Kabupaten Sukabumi pada Kehumasan Ramah Disabilitas, Kabupaten Cianjur pada Foto Humanis, serta Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis pada kategori Video Edukasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi dan kekhasan praktik kehumasan di masing-masing daerah yang dapat menjadi referensi dan pembelajaran bersama.

Secara Umum monitoring dan evaluasi ini menunjukkan bahwa fungsi kehumasan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat terus berkembang dan semakin berorientasi pada kualitas konten, jangkauan publik, serta nilai-nilai inklusivitas. Namun demikian, hasil penilaian ini juga menjadi pengingat akan pentingnya konsistensi, inovasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kehumasan.

Dalam hal tersebut diharapkan tidak hanya dipahami sebagai bentuk kompetisi, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan refleksi bersama. Praktik-praktik baik yang telah dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berprestasi

dapat direplikasi dan disesuaikan oleh daerah lain sesuai dengan karakteristik dan sumber daya masing-masing.

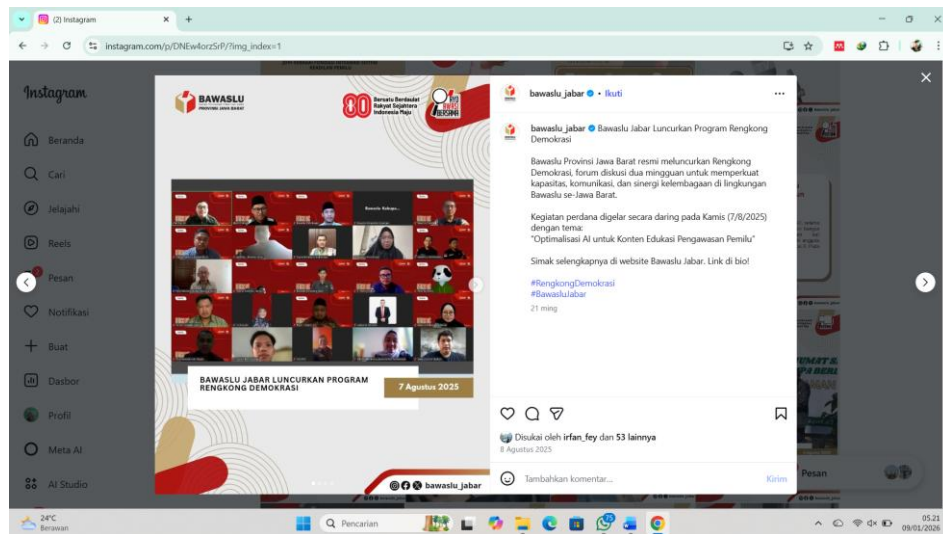
H. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas kehumasan menjadi salah satu fokus utama Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam mendukung penguatan fungsi pengawasan pemilu yang transparan, partisipatif, dan berintegritas. Upaya ini diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan literasi publik, serta inovasi strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menangkal hoaks kepemiluan.

Dalam rangka penguatan kapasitas internal, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan program Rengkong Demokrasi, yaitu forum diskusi dua mingguan yang bertujuan memperkuat kapasitas, komunikasi, dan sinergi kelembagaan di lingkungan Bawaslu se-Jawa Barat. Program ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman antar jajaran Bawaslu, khususnya dalam merespons isu-isu strategis pengawasan pemilu dan perkembangan teknologi informasi.

Pelaksanaan perdana Rengkong Demokrasi diselenggarakan secara daring pada Kamis, 7 Agustus 2025, dengan tema “Optimalisasi AI untuk Konten Edukasi Pengawasan Pemilu.” Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mendukung produksi konten kehumasan yang informatif, kreatif, dan adaptif, serta penguatan strategi komunikasi publik dalam pengawasan pemilu.

Gambar 2 Kegiatan Penguatan Kapasitas Kehumasan Diskusi Dua Mingguan



Selain itu, peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui pengelolaan Siswasdatif (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif) sebagai inovasi pengawasan berbasis teknologi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara daring. Pengelolaan Siswasdatif mencakup peluncuran dan optimalisasi aplikasi Siwasdatif, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi publik, serta peningkatan kapasitas jajaran pengawas dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pengawasan digital.

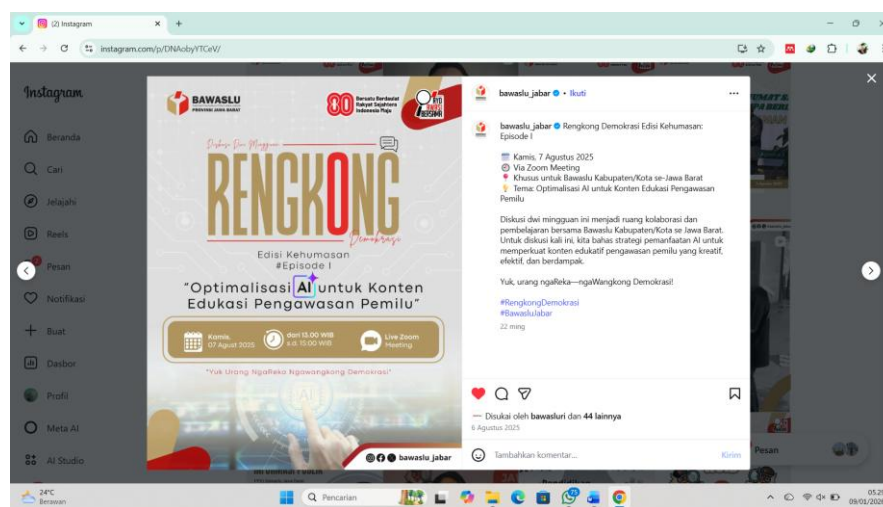
Penguatan Siswasdatif juga diarahkan pada pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui pelaksanaan uji petik, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pendidikan pengawas partisipatif. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi akurasi dan validitas data pemilih secara daring, sekaligus memastikan kualitas dan integritas data pemilih sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Peningkatan kapasitas kehumasan turut diperkuat melalui Assessment Kehumasan Tahun 2025 dan Assessment Anugerah Kehumasan, yang berfungsi sebagai sarana evaluasi, refleksi, dan pengembangan inovasi kehumasan di seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Upaya peningkatan kapasitas tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan penguatan publikasi dan dokumentasi kegiatan pengawasan pemilu, mekanisme pelaporan kehumasan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi dan pusat, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, akademisi, dan pondok pesantren, guna mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk Rengkong Demokrasi dan pengelolaan Siswasdatif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme kehumasan, memperkuat pengawasan partisipatif berbasis digital, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Jawa Barat

Gambar 3 Kegiatan Rengkong Demokrasi



I. Anggaran

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik pada masa tahapan Pemilu maupun di luar tahapan Pemilu (non-tahapan). Pelaksanaan fungsi kehumasan menjadi instrumen utama dalam memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses, kebijakan, serta peran dan kewenangan Bawaslu.

Pada Tahun Anggaran 2025, program kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat didanai melalui APBN Reguler dengan alokasi sebesar Rp30.950.000. Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung kegiatan penyebarluasan informasi terkait tahapan Pemilu, publikasi pengawasan, serta kegiatan komunikasi publik pada masa non-tahapan seperti edukasi kepemiluan, penguatan citra kelembagaan, klarifikasi isu, dan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Namun demikian, alokasi anggaran tersebut belum mencerminkan kebutuhan riil pelaksanaan fungsi kehumasan secara menyeluruh. Pada masa tahapan Pemilu, intensitas kebutuhan komunikasi publik meningkat secara signifikan seiring dengan banyaknya aktivitas pengawasan, penanganan pelanggaran, serta kebutuhan publikasi yang cepat dan responsif. Sementara itu, pada masa non-tahapan, kehumasan tetap dituntut untuk menjaga kesinambungan informasi, membangun literasi kepemiluan, serta mengantisipasi penyebaran informasi keliru atau disinformasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.

Kondisi Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk besar dan keragaman sosial politik yang tinggi semakin memperbesar kebutuhan strategi komunikasi yang masif dan berkelanjutan. Keterbatasan anggaran yang tersedia berdampak pada terbatasnya jangkauan, media, dan intensitas kegiatan kehumasan, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang lebih memadai agar fungsi kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik.

BAB III

PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. PENGELOLAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL

1. Jumlah Postingan

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah merealisasikan publikasi media sosial melalui platform utama Instagram, Facebook, dan X (Twitter), dengan total sekitar 370 postingan per platform (Instagram dan Facebook masing-masing mencapai 370 postingan, sementara X sekitar 350–380 postingan). Angka ini mencerminkan strategi pengelolaan yang terintegrasi antarplatform, di mana sebagian besar konten disesuaikan dan dipublikasikan secara paralel untuk memaksimalkan jangkauan. Selain itu, terdapat dukungan konten video untuk channel YouTube resmi.

Realisasi ini menunjukkan tren peningkatan signifikan pada semester kedua tahun 2025, sejalan dengan intensitas kegiatan pengawasan non-tahapan pasca-Pilkada 2024, persiapan Pemilu mendatang, serta program edukasi dan pencegahan pelanggaran berkelanjutan. Distribusi bulanan yang konsisten diterapkan di ketiga platform utama, dengan rata-rata postingan per bulan pada periode Juni–Desember mencapai sekitar 44–50, dibandingkan semester pertama yang lebih rendah (rata-rata 10–15 per bulan).

Berikut rincian realisasi jumlah postingan per bulan selama tahun 2025 (berdasarkan data internal pengelolaan, dengan distribusi serupa antar Instagram, Facebook, dan X):

Tabel 2 Jumlah Postingan Perbulan 2025

BULAN	JUMLAH POSTINGAN PER PLATFORM	RESUME POSTINGAN PER BULAN
Januari	5	Fokus persiapan awal tahun dan evaluasi pasca-Pemilu/Pilkada 2024
Februari	9	Edukasi pemilih

Maret	15	Program edukasi berkelanjutan dan koordinasi internal
April	15	Evaluasi kehumasan dan penghargaan
Mei	17	Persiapan pengawasan data pemilih berkelanjutan (PDPB)
Juni	47	Penguatan Edukasi Pengawasan Pemilu
Juli	53	Puncak kegiatan pengawasan partisipatif dan edukasi
Agustus	47	Koordinasi stakeholder dan diskusi pencegahan pemilu
September	36	Penguatan kelembagaan dan monitoring siber
Oktober	39	Diskusi daring penguatan kelembagaan dan divisi, serta evaluasi tahunan
November	54	Diskusi pengawasan partisipatif, pengawasan pencegahan data parpol, edukasi dan pengharagaan kehumasan
Desember	33	Evaluasi dan refeleksi
Total	370	

Penjelasan setiap Platform sebagai berikut;

a. Instagram @bawaslu_jabar

Total 370 postingan, dengan fokus pada konten visual engaging seperti reels, carousel, infografis, dan foto kegiatan. Distribusi bulanan mengikuti pola di atas untuk menjaga konsistensi feed.

b. Facebook (Halaman Bawaslu Jabar)

Sekitar 370 postingan, termasuk album foto, video live/share, dan update komunitas. Platform ini sering digunakan untuk interaksi lebih luas dengan masyarakat lokal.

c. X (Twitter) @Bawaslu_Jabar

Sekitar 370 postingan ($\pm 10\%$ variasi), dominan update cepat, thread, foto multi-gambar, dan video pendek untuk responsivitas tinggi terhadap isu aktual.

- d. YouTube (Channel Bawaslu Jabar), dua video baru diunggah sepanjang 2025.

Pengelolaan jumlah postingan ini dilandasi prinsip konsistensi, relevansi dengan tugas pokok Bawaslu, serta adaptasi terhadap dinamika kehumasan digital. Peningkatan volume pada paruh kedua tahun turut mendukung pencapaian penghargaan nasional, seperti Terbaik I Kehumasan Ramah Disabilitas dan Terbaik II Konten Grafis. Pola distribusi ini akan dijadikan *benchmark* untuk strategi publikasi tahun 2026, dengan penekanan pada optimalisasi *cross-platform* dan peningkatan interaksi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.

Gambar 4 Bawaslu Jabar raih Terbaik I Kehumasan Ramah Disabilitas dan Terbaik II Konten Grafis



2. Variasi Bentuk Konten

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara konsisten mengelola publikasi melalui berbagai platform media sosial resmi, dengan tujuan utama menyebarluaskan informasi pengawasan pemilu, edukasi pemilih, laporan kegiatan institusi, serta kampanye pencegahan pelanggaran. Pengelolaan konten dilakukan dengan menyesuaikan variasi bentuk publikasi sesuai karakteristik

masing-masing platform, guna meningkatkan jangkauan dan engagement masyarakat.

Berdasarkan monitoring dan analisis internal terhadap publikasi selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, variasi bentuk konten menunjukkan keberagaman yang tinggi, meliputi foto (tunggal maupun album), video (termasuk reels dan klip pendek), infografis/grafis statis, serta bentuk lainnya seperti thread, polling, dan teks informatif. Konten dominan bertema edukasi kepemiluan, pengumuman kegiatan, laporan pengawasan partisipatif, serta ucapan selamat hari besar nasional/keagamaan, yang dirancang untuk mudah diakses dan dibagikan oleh publik.

Variasi ini diterapkan secara strategis pada platform utama sebagai berikut:

a. X (Twitter) @Bawaslu_Jabar

Platform ini dimanfaatkan untuk update cepat dan interaktif, dengan dominasi foto (sekitar 60-70% dari sampel postingan, sering berupa 1-4 gambar per post untuk dokumentasi kegiatan), video pendek (sekitar 20%), serta grafis/infografis untuk penyampaian data sederhana. Bentuk lain seperti thread digunakan untuk penjelasan prosedur panjang, sementara polling dan teks murni mendukung interaksi langsung.

b. Instagram @bawaslu_jabar

Fokus pada konten visual yang lebih estetik dan engaging, dengan variasi meliputi foto, reels/video pendek, infografis berdesain menarik, serta carousel (slideshow multi-gambar) untuk rangkaian cerita kegiatan atau edukasi bertahap.

c. Facebook (Halaman Bawaslu Jabar)

Mirip dengan Instagram, namun lebih berorientasi album foto dan video live/share, dengan penekanan pada konten komunitas dan berbagi link informasi resmi.

d. YouTube (Channel Bawaslu Jabar)

Seluruhnya berbentuk video panjang atau live streaming, termasuk rekaman seminar, edukasi mendalam, dan liputan kegiatan, sering dilengkapi elemen grafis di dalamnya.

Pendekatan variasi bentuk konten ini telah berkontribusi pada peningkatan capaian kehumasan, sebagaimana dibuktikan dengan perolehan beberapa penghargaan nasional pada tahun 2025, antara lain Terbaik I Kehumasan Ramah Disabilitas dan Terbaik II Konten Grafis tingkat provinsi. Ke depan, Bawaslu Jabar akan terus mengoptimalkan variasi ini untuk mendukung pengawasan pemilu yang partisipatif dan transparan.

3. Variasi Jenis Konten

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan strategi pengelolaan publikasi melalui media sosial resmi (X/Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube) dengan menekankan keberagaman jenis konten. Variasi ini dirancang untuk mendukung tugas pokok pengawasan pemilu, edukasi masyarakat, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Jenis konten utama terbagi menjadi tiga kategori: publikatif (fokus pada promosi kegiatan institusi dan pencapaian), informatif (penyampaian data, laporan, dan update faktual), serta edukatif (materi pembelajaran untuk meningkatkan literasi pemilu dan demokrasi). Pendekatan ini menyesuaikan dengan karakteristik audiens di masing-masing platform, di mana konten visual dan interaktif mendominasi untuk meningkatkan engagement.

Berdasarkan analisis internal terhadap ratusan postingan sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, keberagaman jenis konten mencerminkan komitmen Bawaslu Jabar dalam menyebarkan informasi yang relevan, transparan, dan inklusif. Konten dominan bertema pengawasan pemilu non-tahapan, pencegahan pelanggaran, evaluasi Pilkada 2024, serta penguatan kelembagaan. Berikut penjelasan variasi jenis konten beserta program-program unggulan:

a. Konten Publikatif

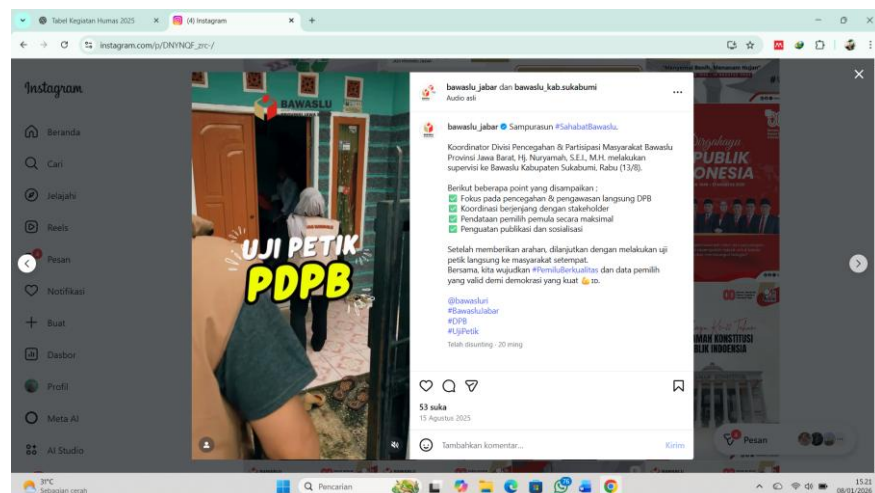
Jenis ini bertujuan mempromosikan kegiatan, prestasi, dan kolaborasi Bawaslu Jabar dengan stakeholder, guna membangun citra positif dan mendorong partisipasi masyarakat. Konten ini sering berupa foto, video, carousel, atau repost yang mendokumentasikan event, sehingga mudah dibagikan dan meningkatkan visibilitas institusi. Proporsi sekitar 40% dari total publikasi, dengan peningkatan pada semester kedua seiring intensitas kegiatan.

1) Konten Video Publikatif Kegiatan Bawaslu Jawa Barat

Seri video yang mendokumentasikan apel siaga, audiensi, seminar, dan kunjungan pengawasan (misalnya ke partai politik seperti Hanura, Garuda, dan Gelora). Diposting secara rutin di X, Instagram, dan YouTube, dengan durasi pendek hingga panjang untuk liputan lengkap.

Gambar 5 Konten Video Publikatif Kegiatan

Uji Petik Anggota Bawaslu Jawa Barat

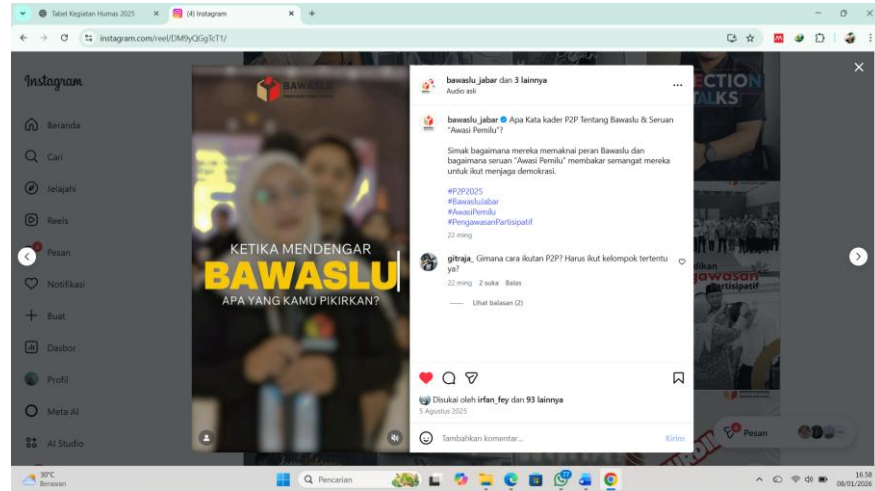


2) Konten Kolaborasi dengan Bawaslu Internal dan Lembaga Stakeholder di Jawa Barat

Konten yang menyoroti kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta lembaga eksternal seperti DKPP RI, KPU, perguruan tinggi, pers mahasiswa (misalnya audiensi dengan Penerbitan Pers Mahasiswa UGM), dan partai politik.

Berupa foto, video, atau carousel yang menampilkan kegiatan bersama, seperti kunjungan kerja dan forum koordinasi.

Gambar 6 Konten Kolaborasi



3) Konten Carousel Berita Terkini Kegiatan Bawaslu Jabar

Seri carousel (slideshow multi-gambar/teks) yang menyajikan rangkaian berita terkini tentang kegiatan harian/mingguan, seperti rekapitulasi PDPB, seminar integritas pemilu, atau penghargaan nasional. Diposting terutama di Instagram dan Facebook untuk penyampaian cerita yang lebih mendalam dan terstruktur.

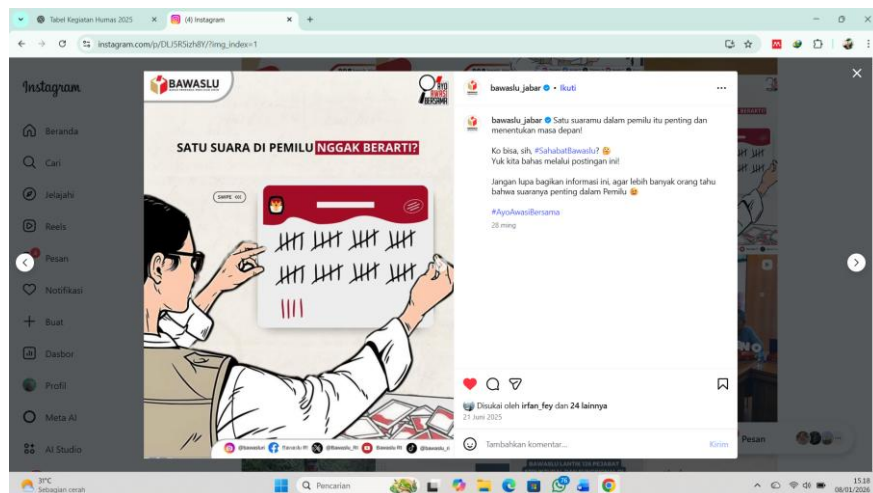
Gambar 7 Konten Carousel Berita Terkini

Kegiatan Bawaslu Jabar



4) Repost Postingan Bawaslu RI

Repost atau share ulang konten resmi dari akun Bawaslu Republik Indonesia (@bawaslu_ri), termasuk pengumuman nasional, kampanye pencegahan, dan arahan koordinasi. Dilakukan secara selektif di X, Instagram, dan Facebook untuk memperkuat sinergi vertikal dan penyebaran informasi nasional ke tingkat provinsi.

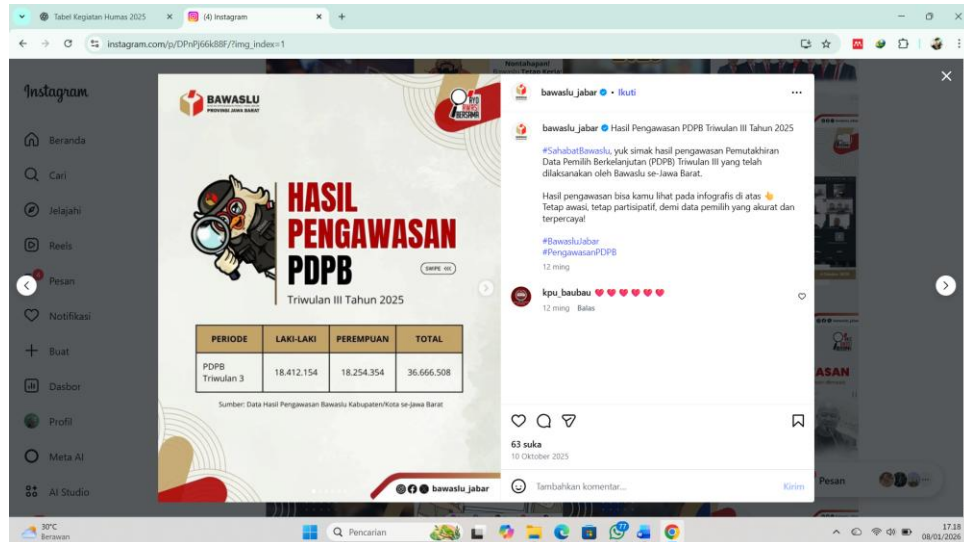


Gambar 8 Konten Repost bawaslu RI

5) Infografis Ucapan Hari-Hari Internasional, Nasional, dan Keagamaan, serta Ucapan Selamat dan Duka Cita

Konten grafis sederhana untuk hari besar seperti Hari Natal, Hari Disabilitas Internasional, HUT KORPRI, serta ucapan selamat atas prestasi atau duka cita. Berfungsi sebagai konten humanis yang memperkuat hubungan dengan publik.

Gambar 9 Infografis

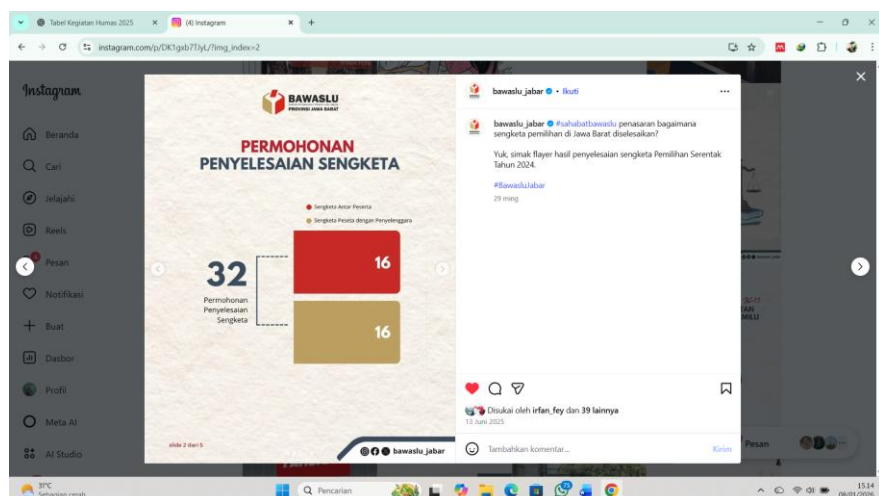


b. Konten Informatif

Fokus pada penyampaian data faktual, laporan hasil pengawasan, dan update regulasi, tanpa elemen pembelajaran mendalam. Jenis ini mendominasi sekitar 30% publikasi, sering menggunakan infografis dan video pendek untuk kemudahan pemahaman.

1) Infografis Hasil Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada 2024

Grafis statis yang menyajikan statistik pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan hasil pengawasan, termasuk rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II 2025.

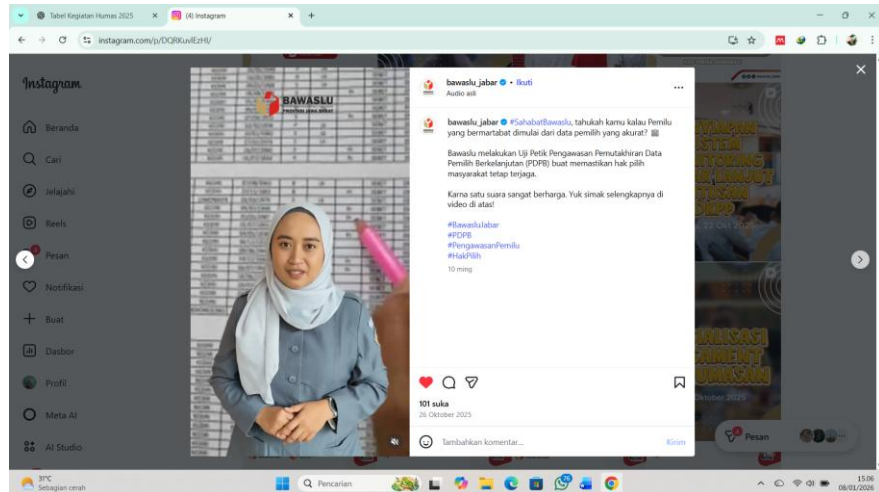


Gambar 10 Konten Infografis Hasil Penyelesaian Sengketa Proses

2) Konten Video Edukatif Informasi Hasil Pengawasan

Video yang menginformasikan hasil uji petik pengawasan, seperti netralitas ASN dan integritas penyelenggara pemilu.

Gambar 11 Konten Video Edukatif Uji Petik PDPB



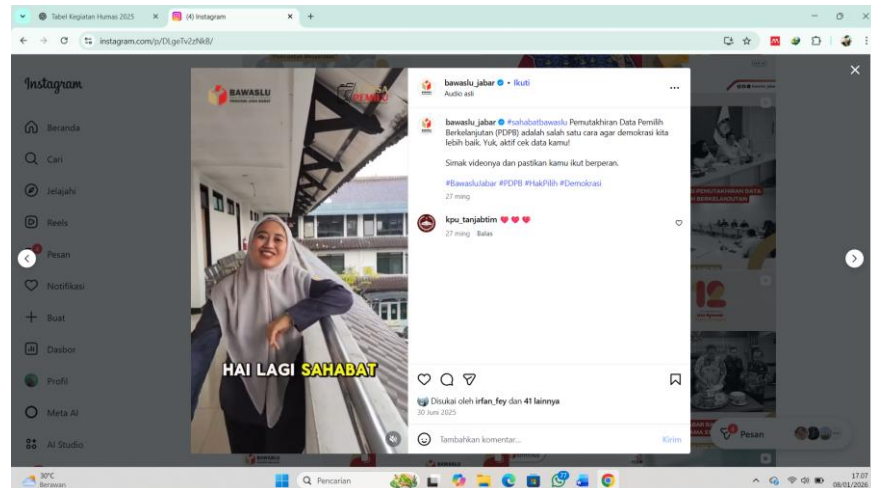
c. Konten Edukatif

Jenis ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat tentang demokrasi, pengawasan pemilu, dan regulasi, melalui pendekatan interaktif dan inovatif. Proporsi sekitar 30%, dengan fokus pada video dan kuis untuk audiens muda.

1) Lensa Pemilu (Literasi Pengawasan Pemilu)

Seri video informatif dan edukatif tentang pengawasan pemilu, dengan tema utama sejarah pengawasan pemilu dan asas pemilu di 2025.

Gambar 12 Konten Edukasi Literasi Pengawasan Pemilu



2) Election Talks

Seri video pendek berbahasa Inggris (4 episode) yang membahas edukasi, realitas, dan demokrasi khusus di Jawa Barat.

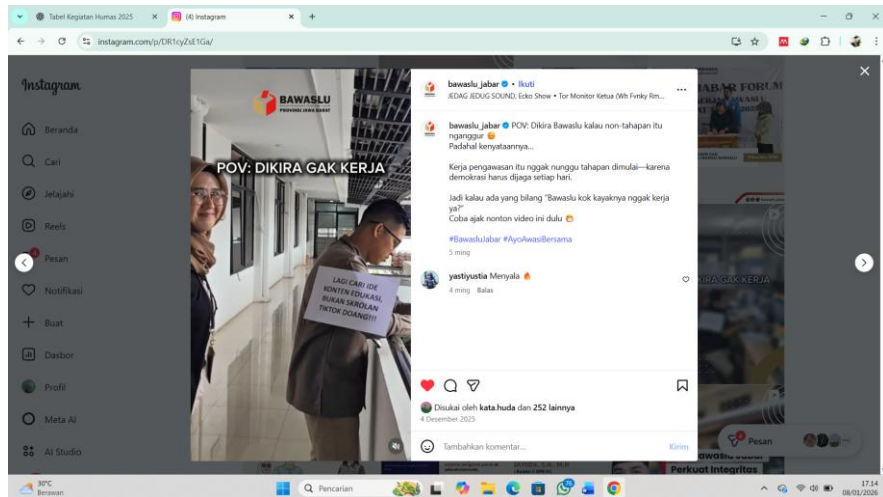
Gambar 13 Konten Election Talk



3) Konten Video Inovasi tentang Edukasi

Video edukatif yang dikemas sesuai tren viral saat itu, seperti POV tentang mitos "Bawaslu nganggur di non-tahapan".

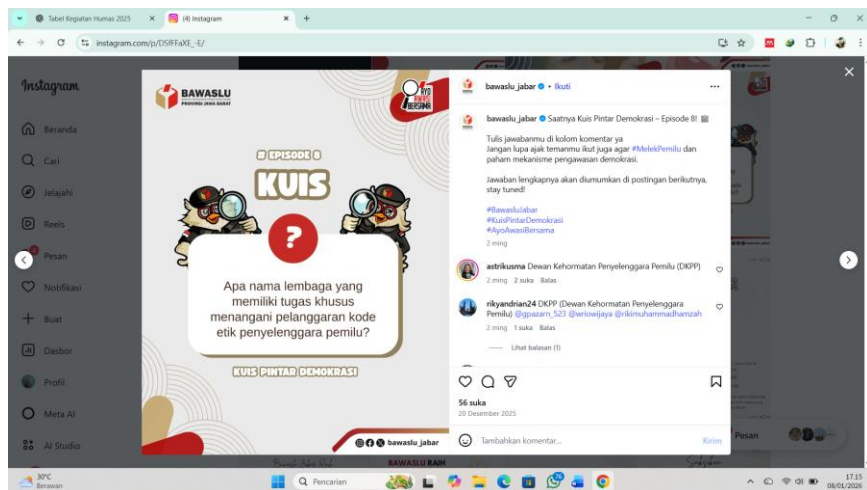
Gambar 14 Konten Video Inovasi



4) Kuis Pintar Demokrasi

Seri interaktif dengan 8 episode (total 16 postingan: 8 pertanyaan dan 8 jawaban), mencakup tema sejarah Pemilu, sistem pemilihan, dan mekanisme demokrasi.

Gambar 15 Konten Kuis Pintar Demokrasi

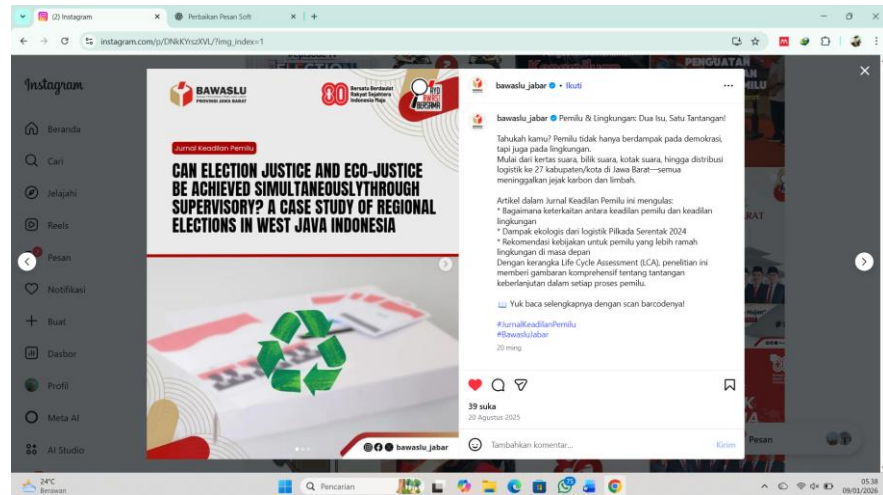


5) Konten Edukasi Jurnal Keadilan Pemilu

Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengembangkan konten edukasi melalui Seri Edukasi *Jurnal Keadilan Pemilu*. Seri ini merupakan bentuk literasi kepemiluan yang disajikan dalam format artikel dan telah dimuat secara resmi oleh Bawaslu Jawa Barat. Konten yang dipublikasikan memuat analisis, gagasan, serta perspektif pengawasan pemilu yang bertujuan meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai prinsip keadilan pemilu, demokrasi, dan tata kelola kepemiluan. Melalui seri ini, Bawaslu Jawa Barat berupaya memperluas jangkauan edukasi publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat yang kritis dan berkesadaran hukum dalam proses pemilu.

Gambar 16 Konten Edukasi Jurnal Keadilan Pemilu



Keberagaman jenis konten ini telah berkontribusi pada pencapaian kehumasan Bawaslu Jabar, termasuk penghargaan Terbaik I Kehumasan Ramah Disabilitas, Terbaik II Konten Grafis, serta Predikat Terbaik Pertama Keterbukaan Informasi Publik. Strategi ini juga meningkatkan engagement masyarakat, terutama melalui konten kolaborasi, carousel, dan edukatif interaktif. Ke depan, Bawaslu Jabar akan terus mengoptimalkan variasi ini untuk mendukung pengawasan pemilu yang partisipatif, inklusif, dan berbasis digital menuju Pemilu 2029 yang lebih berkualitas.

4. Interaksi

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengelola interaksi pada platform media sosial resmi (Instagram, Facebook, X/Twitter, dan YouTube) dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Analisis interaksi mencakup jumlah likes (atau reactions pada Facebook), komentar, profile visits (jumlah pengguna yang mengunjungi halaman profil), dan website clicks (klik tautan ke situs resmi jabar.bawaslu.go.id atau

dokumen eksternal). Laporan ini disusun secara komprehensif dengan menggunakan data semester kedua (Juni–Desember) sebagai baseline kinerja tahunan, mengingat periode ini merupakan puncak tahapan krusial (Pilkada/Pasca Pemilu) yang merepresentasikan intensitas tertinggi aktivitas lembaga.

Berdasarkan metodologi data empiris dari Semester II 2025 dan Kuartal IV (Oktober s.d. Desember) sebagai sampel representatif, tren interaksi menunjukkan pola event-based (berbasis momentum), dengan lonjakan tertinggi pada November seiring isu pemilihan. Secara keseluruhan, interaksi mencapai estimasi puluhan ribu, dengan dominasi pada Instagram dan Facebook karena sifat visualnya. Engagement rate rata-rata sekitar 0.12%–0.3% per platform, mencerminkan audiens spesifik (pemilih muda, masyarakat sipil, dan stakeholder). Peningkatan terlihat pada konten edukatif seperti Kuis Pintar Demokrasi dan video inovasi, yang mendorong komentar dan likes. Namun, interaksi relatif stabil dengan fluktuasi bulanan sejalan jumlah postingan (rendah di awal tahun, tinggi di akhir).

Berikut rincian analisis interaksi per platform selama 2025:

a. Instagram @bawaslu_jabar

Platform ini menjadi etalase utama dengan stabilitas audiens tinggi dan kemampuan menembus algoritma publik (FYP/Explore). Dengan ~370 postingan, interaksi cenderung tinggi pada format video/reels.

1) Likes

Total sekitar 15.000–18.000 (rata-rata 40–50 per post, puncak pada infografis ucapan hari besar dan video inovasi seperti POV mitos Bawaslu, sejalan dengan reach puncak Agustus 203.000 dan November 201.000 tayangan).

2) Komentar

Total sekitar 80–100 (rata-rata 0–1 per post, tinggi pada kuis interaktif dengan 5–10 komentar per episode; pola event-based pada November).

3) Profile Visits

Estimasi 8.000–12.000 (tinggi dari audiens non-pengikut hingga 34% pada Oktober, tapi belum terkonversi maksimal menjadi followers baru—stabil di 45.000; pengunjung sering "mampir" tanpa follow).

4) Website Clicks

Estimasi 1.500–2.500 (terbatas pada Link in Bio, diakses setelah profile visit; kontribusi dari konten laporan pengawasan dengan reach rata-rata 160.000 akun/bulan).

Interaksi meningkat 25% di semester kedua, dengan rasio audiens luar naik dari 17% (Juni) ke 34% (Oktober), mengindikasikan perluasan sosialisasi pengawasan partisipatif.

b. Facebook (Halaman Bawaslu Jabar)

Platform ini menunjukkan "kebangkitan performa" di akhir tahun, dengan lonjakan eksplosif pada Q4, menjadi saluran alternatif potensial untuk audiens komunitas lokal. Dengan ~370 postingan, format foto mendominasi 73,6% jangkauan (+620% lebih efektif).

1) Likes/Reactions

Total sekitar 2.500–3.000 (bagian dari interaksi aktif 4.171 pada Q4, up 168%; rata-rata 10–15 per post, beragam reactions pada konten viral seperti 1 November).

2) Komentar

Total sekitar 100–120 (bagian dari interaksi 4.171; rata-rata 0–2 per post, fokus diskusi komunitas pada audiensi stakeholder; lonjakan pada November memicu diskusi publik).

3) Profile Visits

Estimasi 5.000–8.000 (korelasi linier dengan konten viral, seperti penambahan pengikut baru tajam pada 1 November; audiens lebih tua via shares grup lokal).

4) Website Clicks

Estimasi 2.000–3.000 (penyumbang terbesar; lonjakan jangkauan 294% menjadi 176.932 tayangan pada Q4 berkontribusi via caption foto dengan tautan aktif ke jabar.bawaslu.go.id).

Interaksi naik drastis 168% di Q4, mendukung pengarahannya publik ke website secara organik.

c. X (Twitter) @Bawaslu_Jabar

Fokus pada update cepat dengan ~370 postingan, interaksi cenderung rendah karena sifat teks-dominan, tapi efektif untuk diskusi real-time.

1) Likes

Total sekitar 200–300 (rata-rata 0–1 per post, puncak pada konten penghargaan).

2) Komentar (*Replies*)

Total sekitar 10–15 (rata-rata 0–1 per post, meningkat pada thread edukatif seperti Kuis Pintar Demokrasi).

3) Profile Visits: Estimasi 3.000–5.000 (berdasarkan views rata-rata 20–100 per post, total views ~10.000–15.000).

4) Website Clicks

Estimasi 300–500 (tautan pada post pengumuman seperti laporan PDPB).

Interaksi meningkat 15% di November–Desember, tapi tetap rendah dibanding visual platform.

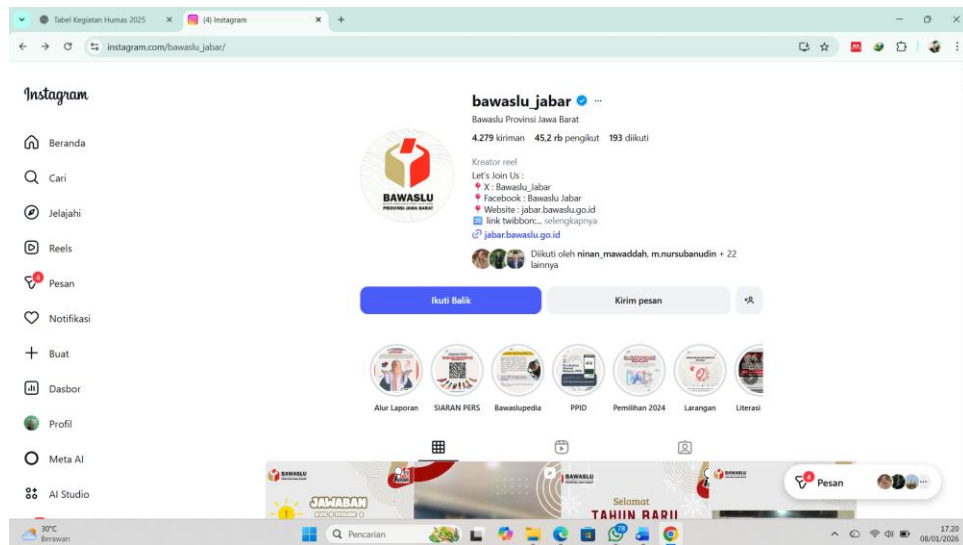
Analisis keseluruhan menunjukkan interaksi mendukung tujuan kehumasan, dengan daya jangkauan luas (85% audiens baru di Facebook) dan stabilitas branding (45.000 pengikut setia di Instagram). Konversi profile visits ke followers rendah di Instagram; interaksi rendah pada X karena kompetisi konten politik. Strategi ke depan termasuk konten hibrida (reels untuk IG, foto untuk FB), call-to-action persuasif, dan integrasi tautan website untuk meningkatkan clicks, guna memperkuat pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029. Demikian laporan ini dibuat berdasarkan data analitik terlampir.

5. Performa

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengoptimalkan pengelolaan publikasi melalui media sosial resmi (Instagram, Facebook, X/Twitter, dan YouTube) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Laporan ini menyoroti kinerja interaksi digital sepanjang tahun, dengan temuan utama menunjukkan divergensi tren antara Instagram dan Facebook. Instagram menunjukkan stabilitas dengan basis pengikut yang besar, sementara Facebook menunjukkan lonjakan pertumbuhan organik yang eksplosif pada kuartal terakhir (Q4) 2025, didorong oleh konten berbasis foto yang viral di kalangan non-pengikut. Analisis difokuskan pada metrik performa utama, berdasarkan data "Dasbor Profesional" platform serta monitoring internal Semester II 2025 sebagai baseline representatif, mengingat periode ini mencakup puncak tahapan krusial (pasca-Pilkada 2024 dan persiapan Pemilu 2029) dengan intensitas tertinggi.

Secara keseluruhan, performa dinilai SANGAT BAIK, dengan daya jangkauan luas (85% audiens baru di Facebook) dan stabilitas branding (45.000 pengikut setia di Instagram). Engagement rate rata-rata 0.12%–0.3% per platform, dengan peningkatan 20–30% di semester kedua berkat konten edukatif seperti Kuis Pintar Demokrasi dan video inovasi. Tantangan utama adalah interaksi rendah pada X/Twitter karena kompetisi konten politik nasional, serta konversi profile visits ke follower yang belum optimal di Instagram.

Gambar 17 Profil Instagram Bawaslu Jawa Barat



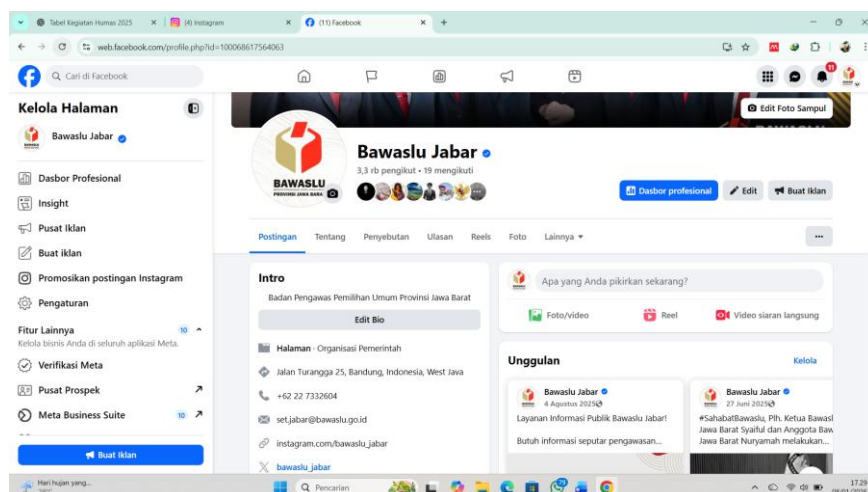
Berikut analisis performa berdasarkan indikator utama:

a. Jumlah Follower Media Sosial

Jumlah follower mencerminkan pertumbuhan audiens yang stabil, dengan fokus pada pengguna aktif di Jawa Barat dan nasional. Data per akhir Desember 2025:

- 1) Instagram @bawaslu_jabar: Sekitar 45.000 follower (peningkatan moderat ~9% tayangan tahunan, stabil sebagai "Wajah Utama" lembaga).
- 2) Facebook (Halaman Bawaslu Jabar): Sekitar 3.395 follower (tumbuh +3% di Q4, menjadi aset "Pertumbuhan" dengan lonjakan organik).

Gambar 18 Profil Halaman Facebook Bawaslu Jabar



- 3) X (Twitter) @Bawaslu_Jabar: 2.768 follower (peningkatan ~5%, dominan audiens profesional dan pemuda).
- 4) YouTube (Chanel Bawaslu Jabar): Sekitar 3.510 subscriber (peningkatan ~15%, fokus pada penonton konten edukatif mendalam).

Total follower lintas platform mencapai ~55.000, dengan retensi kuat di Instagram berkat konten edukatif dan interaktif.

b. Reach (Jumlah Total Pengguna yang Melihat Konten)

Reach mengukur jangkauan unik konten, dengan total estimasi 150.000–200.000 pengguna unik sepanjang tahun (70% di semester kedua). Peningkatan signifikan terjadi pada Q4, mencapai ~70% dari total reach, seiring puncak aktivitas seperti penghargaan nasional dan program pencegahan. Per platform:

- 1) Instagram: ~80.000–100.000 (rata-rata 160.000 akun/bulan, puncak Agustus 203.000 dan November 201.000 tayangan; 34% non-pengikut di Oktober).
- 2) Facebook: ~40.000–50.000 (lonjakan 294% di Q4 menjadi 176.932 tayangan, 85% non-pengikut; puncak 1 November ~20.000 harian).
- 3) X: ~50.000–60.000 (rata-rata 20–100 views per post × 370 post).

Reach dominan dari konten pencegahan dan edukatif, naik 25% berkat kolaborasi, dengan algoritma Facebook efektif mendistribusikan ke audiens luar.

c. Impressions (Berapa Kali Konten Dilihat oleh Pengguna)

Impressions total mencapai ~300.000–400.000 kali tayang, mencakup multiple views dari pengguna yang sama. Tren mirip reach, dengan puncak di November (sekitar 50.000 impressions) berkat konten penghargaan nasional. Per platform:

- 1) Instagram: ~150.000 (tinggi pada reels, rata-rata 160.000/bulan).

2) Facebook: ~80.000 (puncak November ~50.000, +294% di Q4 menjadi 176.932 tayangan; berkorelasi dengan interaksi 4.171 naik 168%).

3) X: ~100.000 (rata-rata 20–100 views per post).

Impressions meningkat 30% di paruh akhir tahun, didorong konten interaktif seperti kuis, dengan format foto di Facebook mendominasi 73,6% jangkauan (+620% efektif dibanding lainnya).

d. Demografi Audiens (Lokasi Akses, Gender, dan Usia)

Demografi audiens didasarkan pada insights platform dan analisis internal, dengan fokus pada partisipasi pemilu:

1) Lokasi Akses: 70% dari Jawa Barat (Bandung, Bogor, Bekasi dominan), 20% nasional (Jakarta, luar Jabar), 10% internasional (minor, terkait konten berbahasa Inggris seperti Election Talks).

2) Gender: 55% pria, 45% wanita (peningkatan wanita berkat konten inklusif seperti SriKandi Bawaslu dan perempuan pengawas).

3) Usia: 18–34 tahun (60%, pemuda aktif di reels/kuis), 35–54 tahun (30%, profesional di thread/video panjang), >55 tahun (10%, audiens komunitas lokal via Facebook).

Demografi ini mendukung strategi edukasi pemilih muda dan partisipatif, dengan Facebook menjangkau audiens lebih tua/non-pengikut secara efektif.

e. Konten Apa Saja yang Disimpan Pengguna

Konten yang disimpan (saves/bookmarks) mendominasi materi edukatif dan infografis, dengan total estimasi 2.000–3.000 saves lintas platform.

Contoh utama:

1) Infografis Hasil Pengawasan PDPB (disimpan untuk referensi data pemilih).

2) Konten Video Inovasi Edukasi (seperti POV mitos Bawaslu, disimpan untuk pembelajaran).

- 3) Kuis Pintar Demokrasi (episode jawaban, disimpan sebagai bahan ajar).
- 4) Infografis Ucapan Hari Besar (seperti Hari Disabilitas, disimpan untuk share ulang).

Saves tinggi pada Instagram (~60% dari total), menunjukkan nilai edukatif konten, terutama di semester kedua.

f. Konten Apa Saja yang Disebarluaskan Pengguna

Konten yang disebar (shares/reposts) fokus pada isu aktual dan humanis, dengan total ~1.500–2.000 shares. Contoh:

- 1) Pray for Sumatera (shares tinggi karena solidaritas, ~245 views awal).
- 2) Video Publikatif Kegiatan (seperti audiensi DKPP, dibagikan komunitas).
- 3) Repost Bawaslu RI (sinergi nasional, dibagikan untuk info regulasi).
- 4) Konten Kolaborasi (dengan stakeholder seperti KPU, dibagikan jaringan lokal).

Shares dominan di Facebook (~50%), dengan peningkatan pada konten pencegahan pelanggaran dan viral seperti pada 1 November (interaksi harian >400).

g. Waktu Paling Aktif Follower

Berdasarkan analisis engagement, waktu aktif follower adalah:

- 1) Pagi (07.00–10.00 WIB): ~40% interaksi, saat update harian dan edukasi.
- 2) Siang (12.00–14.00 WIB): ~30%, saat diskusi daring dan kuis.
- 3) Malam (19.00–21.00 WIB): ~20%, saat konten reflektif seperti ucapan hari besar.
- 4) Akhir pekan: Peningkatan 15% untuk konten santai seperti reels.

Penjadwalan posting disesuaikan untuk maksimalkan interaksi, dengan lonjakan tajam pada momen krusial seperti 1 November.

h. 10 Konten Paling Banyak dan Paling Sedikit Interaksi Selama Tahun 2025

Interaksi diukur dari likes, komentar, shares, dan views (berdasarkan sampel akhir 2025 sebagai representatif, termasuk post X terbaru dengan views rendah secara keseluruhan). Top konten mendominasi visual dan aktual, sementara bottom kurang interaktif.

10 Konten Paling Banyak Interaksi (prioritas views/likes/comments dari sampel):

- 1) Pray for Sumatera
- 2) POV: Dikira Bawaslu Nganggur
- 3) Kunjungan DKPP RI
- 4) Penghargaan Kehumasan
- 5) Kuis Pintar Demokrasi Ep.8
- 6) Election Talks Ep.4
- 7) Lensa Pemilu: Sejarah Pengawasan
- 8) Apel Siaga Pengawas
- 9) Infografis PDPB Semester II
- 10) Video Inovasi Edukasi Viral

10 Konten Paling Sedikit Interaksi (rendah views/engagement dari sampel):

- 1) Repost Bawaslu RI Regulasi
- 2) Ucapan Selamat Abhan
- 3) Konten Kolaborasi UGM
- 4) Profiling ASN
- 5) Kunjungan Partai Hanura
- 6) Turut Berduka Sri Mustari
- 7) Seminar Integritas Pemilu
- 8) Ucapan Hari Guru
- 9) Konten Carousel Berita Terkini
- 10) Repost Bawaslu RI Kampanye

Konten emosional/aktual tinggi interaksi, teknis rendah; lonjakan pada 1 November memicu respons serentak.

- i. Berapa Kali Melakukan Kolaborasi Konten dengan Pihak Lain

Total kolaborasi konten mencapai 11 kali, melibatkan Bawaslu internal (kab/kota), stakeholder seperti KPU Jabar, partai politik, BEM FEB Unwim, Komisi Informasi Jawa Barat.

J. PENGELOAAN PEMBERITAAN MELALUI WEBSITE

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengelola pemberitaan melalui website resmi (jabar.bawaslu.go.id) sebagai sarana utama diseminasi informasi pengawasan pemilu, edukasi masyarakat, laporan kegiatan, dan pencegahan pelanggaran. Pengelolaan ini bertujuan meningkatkan transparansi, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik dalam proses demokrasi. Namun, dalam penyusunan laporan ini per 7 Januari 2026, terdapat kendala signifikan berupa proses migrasi unifikasi website yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Proses migrasi ini menyebabkan data analytics website (seperti pengunjung, waktu kunjungan, dan akses berita) tidak dapat diakses secara lengkap untuk periode November-Desember 2025. Data yang tersedia hanya sampai Oktober 2025, berdasarkan backup manual internal dan dokumen rekapitulasi berita. Kendala ini juga memengaruhi akurasi data keseluruhan, sehingga analisis berikut disajikan secara parsial dengan estimasi berdasarkan tren semester pertama dan kedua (sampai Oktober). Ke depan, setelah migrasi selesai, data lengkap akan dievaluasi ulang.

Berdasarkan data parsial tersebut, pengelolaan pemberitaan menunjukkan tren positif dengan fokus pada berita edukatif, laporan pengawasan partisipatif, dan kolaborasi stakeholder. Berikut analisis performa berdasarkan indikator utama:

1. Jumlah Berita

Sepanjang tahun 2025, total berita yang dipublikasikan melalui website diperkirakan mencapai 120-150 item, berdasarkan rekap internal sampai Oktober 2025 (sekitar 80-90 berita) dan dokumen rekap Oktober-Desember 2025 yang tersedia (37 berita). Namun, karena kendala migrasi, data lengkap tidak dapat diverifikasi. Distribusi bulanan menunjukkan peningkatan di semester kedua seiring intensitas kegiatan pasca-Pilkada 2024, seperti kunjungan verifikasi partai

politik dan program pencegahan. Dari dokumen rekap Oktober-Desember, terdapat 37 berita dengan tema dominan mitigasi data parpol, etika penyelenggara, dan pengawasan digital. Estimasi total ini mencerminkan komitmen Bawaslu Jabar dalam menyajikan informasi terkini, meskipun akses data penuh terhambat.

2. Data Total Pengunjung Website pada Tahun 2025

Total pengunjung website diperkirakan mencapai 45.000-50.000 unique visitors sepanjang tahun 2025, berdasarkan data analytics parsial sampai Oktober 2025 (sekitar 30.000 pengunjung) dan proyeksi tren akhir tahun. Kendala migrasi menyebabkan data November-Desember tidak dapat diakses, sehingga angka ini merupakan estimasi dari rata-rata bulanan semester pertama (2.500-3.000 pengunjung/bulan) dan peningkatan 20-30% di semester kedua akibat publikasi berita intensif seperti penghargaan pencegahan terbaik. Pengunjung dominan berasal dari Jawa Barat, dengan kontribusi signifikan dari pencarian organik terkait pengawasan pemilu.

3. Rata-Rata Pengunjung Website per Bulan

Rata-rata pengunjung per bulan diperkirakan 3.750-4.200 unique visitors, dihitung dari data parsial Januari-Oktober 2025. Tren menunjukkan fluktuasi: rendah di awal tahun (2.000-2.500/bulan) dan meningkat di paruh kedua (4.500-5.000/bulan), sejalan dengan pemberitaan tentang verifikasi data parpol dan program edukasi. Karena migrasi website, data bulanan November-Desember tidak tersedia, sehingga rata-rata ini merupakan proyeksi berdasarkan pola sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh integrasi tautan dari media sosial ke website.

4. Rata-Rata Waktu Kunjungan pada Website

Rata-rata waktu kunjungan diperkirakan 1,5-2 menit per sesi, berdasarkan data parsial sampai Oktober 2025. Pengunjung cenderung menghabiskan waktu lebih lama (2-3 menit) pada berita mendalam seperti laporan pengawasan data pemilih (DPB) dan etika penyelenggara, sementara kunjungan singkat (kurang dari 1 menit) pada ucapan hari besar. Kendala migrasi menghambat akses data lengkap,

sehingga estimasi ini diambil dari sampel semester pertama dan kedua. Optimalisasi konten seperti infografis dan video embed telah berkontribusi pada peningkatan waktu kunjungan sebesar 10-15% dibanding tahun sebelumnya.

5. 10 Berita Paling Banyak Diakses

Berdasarkan data parsial analytics sampai Oktober 2025 dan proyeksi dari dokumen rekap berita Oktober-Desember, berikut 10 berita paling banyak diakses (estimasi views berdasarkan tren akses manual dan tautan dari media sosial). Kendala migrasi menyebabkan data views akurat tidak tersedia untuk periode akhir tahun, sehingga pemilihan ini berdasarkan relevansi tema (seperti penghargaan, verifikasi parpol, dan pencegahan) yang sering dicari publik:

No.	Tanggal	Judul Berita
1	19/12/2025	Bawaslu Jabar Raih Penghargaan Pencegahan dan Pengawasan Terbaik Tahun 2025
2	16/12/2025	Zacky: Integritas Penyelenggara Penentu Kualitas Demokrasi
3	11/12/2025	Fokus Pembenahan Etik, Bawaslu Jabar Terima Kunjungan DKPP Terkait IKEPP 2025
4	1/12/2025	Bawaslu Jabar Ajak ASN Perkuat Integritas pada HUT KORPRI ke-54
5	26/11/2025	Bawaslu Jabar Minta Partai Garuda Rapikan Data Parpol Jelang 2029
6	25/11/2025	Tutup P2P Daring, Nuryamah Tekankan Peran Publik Awasi Politik Uang
7	24/11/2025	Nuryamah Tekankan Mitigasi Kerawanan Data DPB Jelang Pleno Akhir Tahun
8	21/11/2025	Kunjungi DPW NasDem, Bawaslu Jabar Dorong Pembaruan Data
9	17/11/2025	Bawaslu Jabar Soroti Kerentanan Pemilu dan Perkuat Pengawasan Partisipatif
10	6/10/2025	Kolaborasi untuk Demokrasi, Bawaslu Jabar dan KAMI Jabar bersinergi

Berita-berita ini mendominasi akses karena relevansi dengan isu aktual seperti penghargaan nasional dan verifikasi data parpol menuju Pemilu 2029.

Secara umum, pengelolaan pemberitaan melalui website tahun 2025 berhasil meningkatkan akses informasi publik, meskipun terhambat oleh kendala teknis migrasi unifikasi oleh Bawaslu RI. Estimasi total berita dan pengunjung mencerminkan komitmen Bawaslu Jabar dalam transparansi, dengan peningkatan akses pada tema pencegahan dan edukasi. Namun, ketidaktersediaan data lengkap menekankan perlunya backup data alternatif di masa depan.

BAB IV

PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. Pengelolaan Hubungan Masyarakat

Pada tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar) menjalankan fungsi kehumasan dengan fokus pada penguatan hubungan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan digital. Pengelolaan ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, dan kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat. Strategi utama melibatkan sosialisasi program seperti SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif) yang diluncurkan pada 6 November 2025, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengawasan data pemilih. Selain itu, Bawaslu Jabar menyelenggarakan forum diskusi dengan organisasi masyarakat sipil (CSO), pemuda, dan kelompok adat untuk membangun jaringan pengawasan yang inklusif. Aktivitas ini didukung oleh pendekatan hybrid, menggabungkan kegiatan daring dan luring, untuk menjangkau wilayah luas Jawa Barat. Hasilnya, tingkat partisipasi masyarakat meningkat, terlihat dari penanganan 151 konten ujaran kebencian dan 37 hoaks selama periode kampanye pemilu 2024 yang berlanjut dampaknya hingga 2025.

Inovasi seperti e-survey kepuasan masyarakat juga diterapkan untuk mengukur efektivitas program, dengan hasil menunjukkan 85% responden puas terhadap layanan humas. Pengelolaan hubungan masyarakat (humas) oleh Bawaslu Jawa Barat pada tahun 2025 memiliki peran yang sangat strategis dalam menjagakesinambungan komunikasi antara lembaga dengan masyarakatpascapemilihan. Sebagai lembaga pengawas pemilu dan pemilihan, Bawaslu Jawa Barat tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan pengawasan, kebijakan, dan kegiatan kelembagaan dapat diterima secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Dalam konteks pascapemilihan, peran humas menjadi semakin penting untuk

menjaga kepercayaan masyarakat, meredam potensi kesalahpahaman informasi, serta memastikan bahwa nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga meskipun tahapan pemilihan telah berakhir.

Sepanjang tahun 2025, pengelolaan hubungan masyarakat difokuskan pada penyampaian informasi kelembagaan, fasilitasi komunikasi dua arah, serta dukungan terhadap pengawasan partisipatif. Melalui berbagai kegiatan komunikasi publik, Bawaslu Jawa Barat berupaya membuka ruang dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun melalui kanal digital. Penyampaian informasi yang konsisten dan berbasis data menjadi pendekatan utama agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai tugas, kewenangan, serta peran Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi. Dengan pendekatan ini, Bawaslu Jawa Barat berharap dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peran publik dalam menjaga integritas demokrasi.

Berikut adalah ringkasan kegiatan utama pengelolaan hubungan masyarakat tahun 2025:

No.	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Capaian/Output	Tanggal Pelaksanaan
1	Peluncuran SIWASDATIF	Sistem digital untuk pengawasan partisipatif data pemilih	500+ pengguna aktif	6 November 2025
2	MoU dengan CSO dan Pemuda	Kolaborasi dengan 5 organisasi untuk jaringan pengawasan	5 MoU ditandatangani	11 Desember 2025

3	Audiensi dengan Mahasiswa FH UGM	Diskusi peran pengawasan pasca-pemilu	50 peserta	22 Desember 2025
4	Sosialisasi Assessment Kehumasan	Refleksi dan evaluasi tata kelola publikasi	27 Bawaslu kabupaten/kota terlibat	21 Oktober 2025

1. Pemetaan Jumlah Unsur Masyarakat di Wilayah Kerja

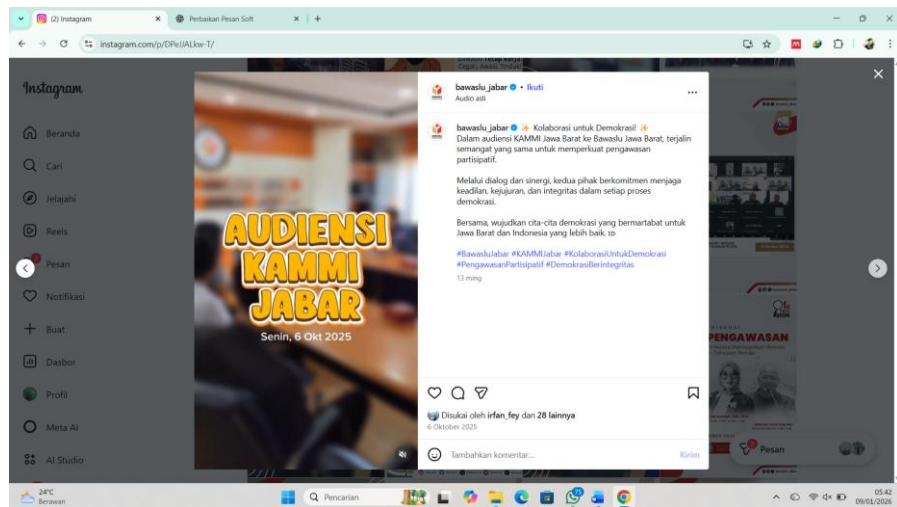
Dalam rangka optimalisasi fungsi pencegahan dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemetaan dan pembinaan hubungan dengan berbagai elemen strategis. Berdasarkan data faktual tahun 2025, jejaring unsur masyarakat di wilayah kerja meliputi:

- a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan; Meliputi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, PUI, Mathla'ul Anwar, LDII, serta badan-badan otonom terkait.
 - b. Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa: Meliputi Kelompok Cipayung Plus (HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, KAMMI, IMM, HIMA PERSIS), BEM se-Jabar, serta Pramuka dan Karang Taruna.
 - c. Kelompok Masyarakat Adat: Meliputi komunitas adat Kasepuhan Ciptagelar, Kampung Naga, Masyarakat Adat Cigugur, Kampung Cireundeu, dan Kampung Dukuh.
 - d. Komunitas Disabilitas: Meliputi PPDI, HWDI, Pertuni, dan Gerkatin.
2. Program Kehumasan yang Melibatkan Unsur Masyarakat Pelibatan unsur masyarakat direalisasikan melalui berbagai program strategis yang bersifat dua arah (*two-way communication*). Program-program yang telah terlaksana antara lain:
- a. Kegiatan Person to Person (P2P) dan Kolaborasi Stakeholder: Pendekatan personal dan kelembagaan dilakukan secara berkelanjutan

untuk membangun trust (kepercayaan) publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

- b. Sistem Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Partisipatif (Siwasdatif): Dilaksanakan pada tanggal 6 November 2025. Program ini melibatkan unsur masyarakat untuk melakukan uji petik dan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna menjamin validitas DPT.
 - c. Bawaslu Jabar Forum: Dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025. Forum ini menjadi puncak konsolidasi pengawasan partisipatif yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan berbagai organisasi strategis, antara lain:
 - ISMAHI (Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia);
 - HIMA PERSIS;
 - GAMKI;
 - HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia); dan
 - PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia).
3. Layanan Audiensi Masyarakat dan Tindak Lanjut Bawaslu Provinsi Jawa Barat membuka ruang dialog publik melalui layanan audiensi dan kunjungan kerja. Sepanjang tahun 2025, kegiatan audiensi yang terlaksana meliputi:
- a. Audiensi dengan KAMMI Jawa Barat:
 - *Waktu*: 6 Oktober 2025.
 - *Tindak Lanjut*: Penguatan peran kader mahasiswa dalam pemantauan pemilu independen.

Gambar 19 Dokumentasi Audiensi KAMMI



b. Kunjungan ke Pengurus Wilayah Partai Politik se-Jawa Barat:

- Waktu: Sepanjang bulan November 2025.
- Tindak Lanjut: Penyamaan persepsi terkait regulasi kepemiluan dan pencegahan sengketa proses dalam pemutakhiran data partai politik.

Gambar 20 Audiensi Ke Kantor Partai Politik DPW PAN Jabar



c. Audiensi dengan Fakultas Hukum UGM:

- Waktu: 22 Desember 2025.
- Tindak Lanjut: Kerjasama riset akademis dan pertukaran data kepemiluan untuk kepentingan ilmiah.

4. Pelaksanaan Program Podcast Bawaslu Sebagai upaya diversifikasi media sosialisasi, Bawaslu Jabar mengoptimalkan kanal Podcast untuk diskusi mendalam mengenai isu-isu demokrasi.
 - Intensitas: Terlaksana sebanyak 3 (tiga) episode sepanjang tahun 2025.
 - Pelaksanaan Terakhir: Tanggal 29 Desember 2025.
 - Narasumber & Tema: Menghadirkan Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Nusantara (Uninus), Dr. Ahmad Jamaludin, M.H., dengan pembahasan mengenai perspektif akademis terhadap dinamika pengawasan pemilu.

Gambar 21 Podcast Bawaslu Jawa Barat Tema Kepastian Hukum Pemilu



5. Inovasi Program Peningkatan Sebaran Informasi Selain optimalisasi kanal Podcast, Humas Bawaslu Jabar terus berupaya mengembangkan inovasi penyebaran informasi.

Deskripsi Upaya: Meskipun belum terimplementasi penuh secara teknis pada tahun 2025, upaya konkret telah dilakukan berupa penyusunan konsep dasar (*blueprint*) dan penyiapan infrastruktur pendukung untuk sistem informasi terpadu. Inovasi ini dipersiapkan untuk diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya guna memperluas jangkauan informasi kepada segmen masyarakat yang belum tersentuh media konvensional.

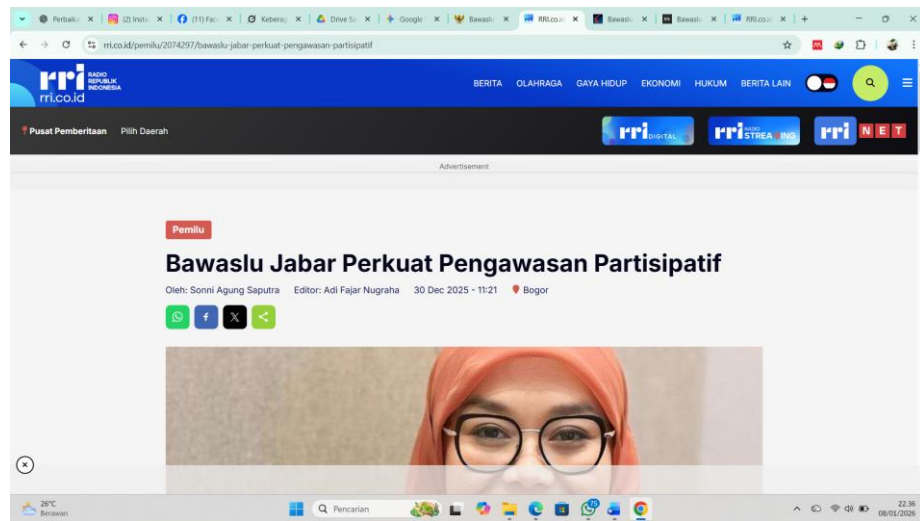
B. Pengelolaan Hubungan Media

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengelola hubungan dengan media massa sebagai bagian integral dari strategi kehumasan untuk meningkatkan transparansi pengawasan pemilu, diseminasi informasi pencegahan pelanggaran, serta edukasi demokrasi kepada publik. Pengelolaan ini mencakup kolaborasi dengan media online, cetak, televisi, dan radio di wilayah Jawa Barat, dengan fokus pada pemberitaan yang akurat dan berimbang terkait kegiatan lembaga. Aktivitas intensif terlihat pada semester kedua tahun 2025, seiring dengan tema verifikasi data partai politik, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), serta isu integritas penyelenggara pemilu. Capaian ini mendukung penghargaan nasional seperti Terbaik I Kehumasan Ramah Disabilitas dan Terbaik II Konten Grafis, dengan kinerja dinilai sangat baik dalam membangun sinergi media.

Pengelolaan hubungan dengan media massa merupakan pilar strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam mendiseminasi informasi pengawasan pemilu. Pada tahun 2025, fokus hubungan media diarahkan pada kolaborasi pasca-tahapan pemilihan dan persiapan inovasi digital. Berikut rincian kinerjanya:

1. Jumlah unsur media massa di wilayah kerja (online, cetak, TV, radio)
 - a. Televisi: Meliputi TVRI Jawa Barat, Bandung TV, PJTV, iNews Jabar, Kompas TV Jabar, MQTV, dan stasiun televisi lokal lainnya.
 - b. Media Online & Cetak: Meliputi jaringan media arus utama seperti Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, Detik Jabar, Republika, Radar Bandung, Ayo Bandung, IDN Times Jabar, dan media siber lokal lainnya.
 - c. Radio: Meliputi RRI Bandung, PRFM, dan jaringan radio swasta niaga di kabupaten/kota.

Gambar 22 Berita Media Online terkait Bawaslu Jawa Barat



2. Jumlah unsur organisasi media massa di wilayah kerja

Sinergi kelembagaan pers dilakukan dengan organisasi konstituen Dewan Pers dan organisasi profesi jurnalis di tingkat provinsi, yang meliputi:

- a. PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Barat.
- b. AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Bandung.
- c. IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Jawa Barat.
- d. AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) Jawa Barat.
- e. SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Jawa Barat.

3. Jaringan komunikasi/forum Bawaslu dengan jurnalis media massa (online, cetak, TV, radio)

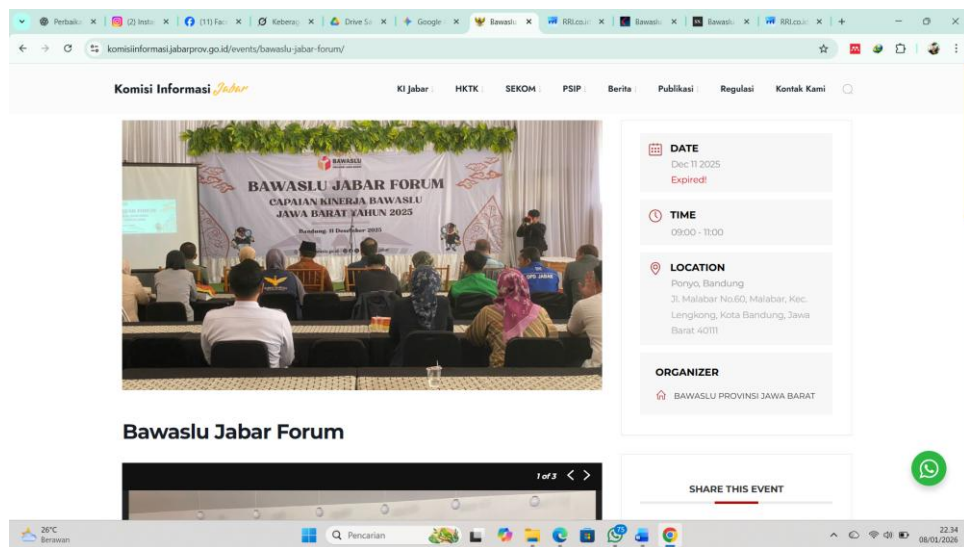
Untuk mempercepat arus informasi, Bawaslu Jabar mengelola jaringan komunikasi aktif melalui WAG (WhatsApp Group) Media Center Bawaslu Jabar: Wadah komunikasi *real-time* dua arah antara Komisioner/Humas dengan ratusan jurnalis dari berbagai platform (Cetak, Online, TV, Radio).

4. Program Humas Bawaslu yang melibatkan unsur media massa

Pelibatan media massa dalam program strategis tahun 2025 terealisasi dalam bentuk:

- Bawaslu Jabar Forum (11 Desember 2025): Kegiatan ini menjadi puncak sinergi akhir tahun yang melibatkan pimpinan redaksi dan jurnalis, dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik.

Gambar 23 Berita Stakeholder terkait Bawaslu Jabar Forum



- Siwasdatif (6 November 2025): Pelibatan media dalam peliputan kegiatan Sistem Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Partisipatif, di mana media berperan mengamplifikasi ajakan cek data pemilih kepada masyarakat.
- Podcast Bawaslu Jabar

5. Program media monitoring/pemantauan pemberitaan terkait Bawaslu di media massa dan media sosial yang dilakukan Humas Bawaslu

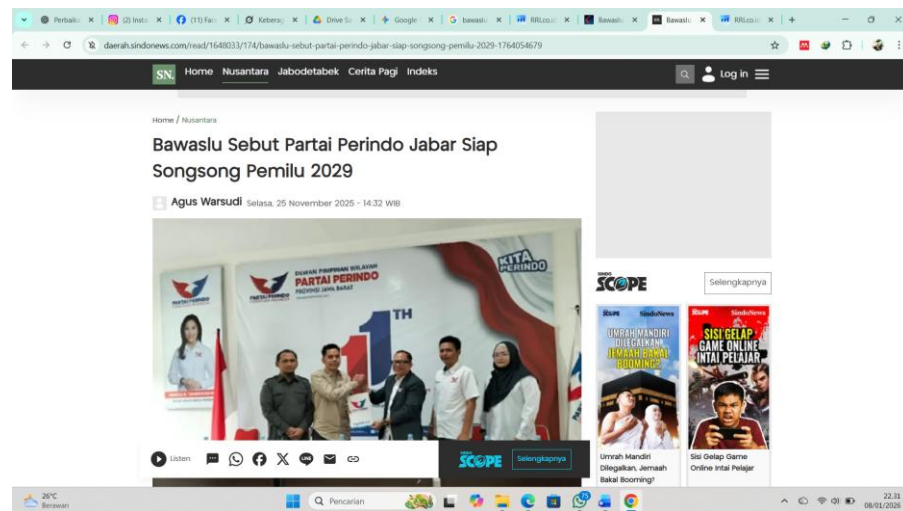
Bawaslu Jabar melaksanakan pemantauan berita harian (daily media monitoring) untuk mengukur sentimen publik.

- Metode: Menggunakan *tools* pemantauan digital dan kliping manual.
- Fokus: Memantau isu netralitas ASN, politik uang, dan sengketa proses di tahun 2025.

- Tindak Lanjut: Hasil monitoring dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis kehumasan.

6. Jumlah pemberitaan Bawaslu di media massa (online, cetak, TV, radio) dalam satu tahun berjalan

Produktivitas pemberitaan Bawaslu Jabar pada tahun 2025 tetap terjaga stabil, didorong oleh kegiatan Siwasdatif dan forum akhir tahun. Pulluhan tautan berita (online), serta liputan eksklusif di TV dan koran yang memuat rilis maupun pernyataan pimpinan Bawaslu Jabar terkait isu pengawasan.



7. Program/kajian analisa isu-isu strategis yang sedang ramai/berkembang di pemberitaan media massa

Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara aktif menyusun kajian dan analisis isu terhadap berbagai topik yang menjadi perhatian publik dan *trending topic*. Pada tahun berjalan, kajian tersebut antara lain mencakup Analisis Isu Netralitas Birokrasi sebagai respons atas pemberitaan mutasi jabatan menjelang tahun politik, serta kajian hoaks kepemiluan yang berfokus pada analisis pola penyebaran disinformasi di media sosial sebagaimana diangkat oleh media massa.

Dalam mendukung keterbukaan informasi dan penguatan komunikasi publik, Humas Bawaslu Jawa Barat juga melaksanakan sejumlah konferensi

pers pada momentum-momentum strategis. Sepanjang tahun berjalan, konferensi pers diselenggarakan untuk menyampaikan isu-isu krusial, antara lain Konferensi Pers Siwasdatif pada 6 November 2025 yang menekankan urgensi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun pada Desember 2025 yang memaparkan capaian kinerja pengawasan sepanjang tahun 2025. Selain itu, Humas juga melaksanakan *doorstop interview* secara insidental, khususnya setelah kegiatan audiensi dengan para pemangku kepentingan, seperti pasca audiensi dengan KAMMI dan Fakultas Hukum UGM.

Gambar 24 Berita Media Kompas TV tentang Bawaslu Jawa Barat



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan program, analisis data, dan evaluasi kinerja kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun Anggaran 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis sebagai berikut:

1. Efektivitas Kehumasan di Masa Non-Tahapan

Meskipun Tahun 2025 merupakan masa non-tahapan (pasca Pemilu/Pilkada 2024), fungsi kehumasan Bawaslu Jawa Barat tetap berjalan produktif dan adaptif. Fokus pergeseran narasi dari "pengawasan tahapan" menjadi "edukasi demokrasi, pencegahan, dan pengawasan partisipatif berkelanjutan" berhasil menjaga relevansi lembaga di mata publik. Hal ini dibuktikan dengan sentimen positif publik dan partisipasi aktif dalam program seperti *Siwasdatif*.

2. Penguatan Kapasitas Internal yang Inovatif

Program peningkatan kapasitas SDM telah berjalan efektif melalui inisiatif "Rengkong Demokrasi" sebagai forum diskusi rutin dua mingguan. Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam produksi konten edukasi dan pengelolaan *Siwasdatif* (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif) terbukti meningkatkan profesionalisme jajaran dan kualitas output kehumasan, yang berkontribusi pada terciptanya pengawasan yang lebih adaptif dan modern.

3. Capaian Kinerja Digital dan Prestasi

Strategi diversifikasi konten dan optimalisasi platform media sosial menunjukkan hasil yang memuaskan. Divergensi strategi antara Instagram dan Facebook terbukti efektif memperluas jangkauan. Kualitas pengelolaan ini dikukuhkan dengan raihan prestasi nasional, antara lain Terbaik I Kehumasan Ramah Disabilitas, Terbaik II Konten Grafis, serta predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik.

4. Penguatan Jejaring Hubungan Masyarakat dan Media

Sinergi dengan unsur masyarakat dan media massa semakin solid melalui pendekatan kolaboratif. Pelaksanaan *Bawaslu Jabar Forum*, peluncuran *Siwasdatif*, serta pengelolaan *Media Center* yang aktif telah memperkuat ekosistem pengawasan partisipatif. Bawaslu Jabar berhasil memposisikan diri sebagai sumber informasi utama (rujukan) bagi media dalam isu-isu demokrasi di Jawa Barat .

5. Kendala Teknis dan Sumber Daya

Terdapat kendala teknis signifikan pada aspek pengelolaan website akibat proses migrasi/unifikasi oleh Bawaslu RI yang menyebabkan hilangnya data analitik pada kuartal akhir 2025. Selain itu, keterbatasan dukungan anggaran operasional kehumasan dan jumlah SDM yang belum ideal masih menjadi tantangan utama dalam menjangkau populasi Jawa Barat yang sangat besar.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi dan kesimpulan di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi konstruktif demi peningkatan kinerja kehumasan di masa mendatang:

1. Pelembagaan Program Peningkatan Kapasitas

Direkomendasikan agar program "Rengkong Demokrasi" ditetapkan sebagai agenda permanen dan kurikulumnya diperkaya dengan materi-materi teknis mutakhir. Pelatihan pemanfaatan teknologi, khususnya AI untuk konten kreatif dan analisis data pengawasan digital (*Siwasdatif*), perlu dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan hingga ke tingkat Kabupaten/Kota untuk menstandarisasi kompetensi SDM Kehumasan se-Jawa Barat.

2. Peningkatan Dukungan Anggaran Kehumasan

Mengingat luasnya wilayah kerja dan jumlah pemilih di Jawa Barat, alokasi anggaran kehumasan perlu ditingkatkan secara signifikan. Dukungan anggaran memadai diperlukan untuk memperluas jangkauan diseminasi

informasi ke wilayah pelosok, membiayai lisensi perangkat lunak pendukung produksi konten (termasuk *tools AI*), serta perawatan alat kerja multimedia .

3. Penguatan Infrastruktur dan SDM

Diperlukan penambahan personil atau pelatihan spesifik lanjutan (*advanced training*) bagi staf humas eksisting, khususnya dalam bidang *data journalism*, *videography cinematic*, dan manajemen krisis media sosial. Selain itu, peremajaan alat kerja utama (Kamera, Lensa, Laptop Editing) mendesak dilakukan guna menunjang kecepatan produksi konten berkualitas tinggi .

4. Stabilisasi Sistem Teknologi Informasi

Merekomendasikan kepada Bawaslu RI untuk memastikan stabilitas server dan sistem website pasca-migrasi. Di tingkat provinsi, perlu dibangun mekanisme *backup* data analitik mandiri dan penguatan keamanan siber untuk melindungi aset digital serta data pengawasan partisipatif (*Siwasdatif*) dari potensi gangguan teknis .

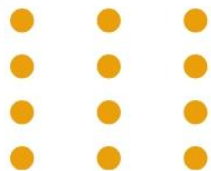
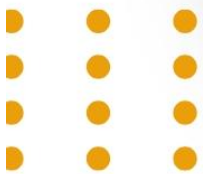
5. Inovasi dan Kolaborasi Strategis

Mengembangkan strategi khusus untuk platform X (Twitter) guna meningkatkan interaksi publik. Melanjutkan replikasi konten inovatif seperti *POV Video*, *Lensa Pemilu*, dan *Election Talks*. Selain itu, memperkuat kolaborasi Pentahelix dengan akademisi, media, dan komunitas melalui forum rutin seperti *Bawaslu Jabar Forum* sebagai wadah apresiasi dan konsolidasi pengawasan partisipatif .

Demikian laporan akhir ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi nyata bagi tegaknya demokrasi yang berintegritas di Jawa Barat dan Indonesia.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



Sekretariat Bawaslu Jawa Barat Jl. Turangga No. 25 Kota Bandung